Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-8831

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PERKAWINAN PAKSA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Pasuruan Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas)

[1]Gemilang Ayu Lestari [2]Shofiatul Jannah [3]Dwi Ari Kurniawati
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012049@unisma.ac.id, [2]shofia@unisma.ac.id [3]dwi.ari@unisma.ac.id

Abstract

This study juristically analyzes marriage annulment due to forced marriage, specifically examining the procedures and the judge's decision in Case Number 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas at the Pasuruan Religious Court. The findings reveal that the annulment procedure at the Pasuruan Religious Court strictly adheres to existing regulations, including Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), with meticulous attention to evidence, particularly concerning the element of compulsion in marriage. Furthermore, the analysis of the judge's ruling demonstrates that the judge's considerations align with relevant statutes, such as Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, by meticulously identifying violations of Article 9 of the Marriage Law and Article 71 of the KHI, which fundamentally govern free consent and the absence of coercion in marriage. The judge's considerations align with relevant statutes, identifying violations of free consent in marriage, thereby demonstrating an active implementation of substantive justice, legal certainty, and utility.

Keywords: *Marriage Annulment, Forced Marriage, Judge's Considerations, Marriage, Judicial Analysis*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu institusi hukum yang secara resmi diakui oleh negara dengan tujuan untuk melegalisasi hubungan antara sepasang individu. Ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita ini memiliki konsekuensi hukum tertentu. Regulasi mengenai perkawinan secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, terdapat pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (Rosdiana, N., 2022) Khusus bagi masyarakat Muslim, aspek pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan kewajiban pencatatan setiap perkawinan demi menjamin ketertiban. Proses pencatatan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Nomor 32 Tahun 1954 (Septiyani, I., 2022).

Perkawinan adalah manifestasi ajaran Rasulullah SAW, yang menjadi sumber inspirasi utama bagi umat Islam dalam membangun fondasi kehidupan berumah

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

tangga. Lebih dari sekadar ikatan sosial, sunah Rasulullah SAW ini menawarkan panduan komprehensif yang meliputi arahan moral dan spiritual bagi individu yang memasuki jenjang perkawinan. Tujuan utama dari panduan ini adalah untuk membimbing umat islam mencapai kebahagiaan paripurna, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat, melalui harmonisasi dan keberkahan dalam institusi perkawinan. Ini mencakup aspek-aspek seperti hak dan kewajiban suami istri, etika interaksi dalam keluarga, serta tujuan-tujuan luhur dari terbentuknya suatu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (Adharsyah, M., & Sidqi, M., 2024).

Meskipun Islam sangat menekankan pada pemeliharaan kesatuan keluarga, terdapat kondisi tertentu di mana perpisahan menjadi solusi yang dianggap terbaik. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengakhiran ikatan perkawinan dapat dilakukan melalui dua cara legal, yaitu perceraian atau pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi berdasarkan dua kategori alasan fundamental yang menjadi dasar hukumnya. Kategori pertama berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap persyaratan sahnya pernikahan yang seharusnya telah terpenuhi secara mutlak sejak awal akad dilangsungkan. Ini mencakup kondisi-kondisi pra-perkawinan yang, jika tidak dipenuhi atau dilanggar, secara inheren menjadikan perkawinan tersebut cacat hukum sejak awal pembentukannya. Contohnya adalah ketidaksesuaian dengan batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang, adanya halangan perkawinan yang tidak diindahkan, atau ketiadaan rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif maupun hukum agama.

Sementara itu, kategori kedua melibatkan faktor-faktor yang muncul pasca-pelaksanaan akad nikah, namun memiliki dampak retrospektif terhadap keabsahan perkawinan. Meskipun perkawinan telah dilangsungkan dan secara formal tampak sah pada awalnya, peristiwa atau fakta yang terungkap kemudian dapat menjadi dasar hukum bagi pembatalan. Ini bisa meliputi, antara lain, adanya unsur penipuan yang baru terungkap setelah pernikahan, paksaan yang menghilangkan kehendak bebas salah satu pihak, atau kesalahan identitas yang mendasar. Dalam konteks ini, pembatalan perkawinan bukanlah perceraian, melainkan suatu deklarasi bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada secara sah sejak awal karena adanya cacat fundamental yang baru diketahui atau dibuktikan di kemudian hari (Patampari 2020).

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menguraikan berbagai alasan yuridis yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan, termasuk namun tidak terbatas pada adanya penipuan, ketidaklengkapan syarat sah perkawinan, atau unsur paksaan. Keputusan

pembatalan perkawinan ini ditetapkan melalui keputusan majelis hakim, dan ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pihak-pihak yang bermaksud mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit menjamin kepastian hukum terkait pembatalan perkawinan. Pasal ini secara gamblang mengatur bahwa suatu pernikahan tidak bisa serta-merta dianggap batal hanya berdasarkan dugaan atau klaim semata. Sebaliknya, keabsahan pembatalan perkawinan sepenuhnya bergantung pada proses hukum formal. Secara spesifik, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan baru secara sah dinyatakan batal setelah diterbitkannya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, putusan tersebut tidak lagi dapat diajukan banding atau kasasi, sehingga status hukum perkawinan menjadi final dan mengikat. Ketentuan ini penting untuk mencegah tindakan sepihak dan memastikan bahwa setiap pembatalan perkawinan didasarkan pada pemeriksaan dan keputusan yudisial yang cermat, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut (Azhari & Priandini, 2022).

Di luar alasan-alasan pembatalan perkawinan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat satu faktor krusial lain yang dapat membatalkan suatu ikatan pernikahan: perkawinan paksa. Fenomena ini sering kali diinisiasi oleh anggota keluarga, khususnya orang tua, yang memaksakan kehendak mereka dalam pemilihan pasangan bagi anaknya, tanpa mempertimbangkan keinginan atau kesediaan individu yang bersangkutan. Dalam terminologi Islam, praktik perkawinan paksa ini dikenal dengan istilah ‘nikah ijbar’. Secara etimologis, "ijbar" sendiri mengandung makna "pemaksaan". Oleh karena itu, nikah ijbar secara spesifik merujuk pada situasi di mana sebuah pernikahan dilangsungkan dengan adanya pemaksaan terhadap salah satu pihak, sehingga individu tersebut tidak memberikan persetujuan atau kerelaannya secara bebas dan sukarela. Ketiadaan konsensus yang tulus ini menjadi inti permasalahan dan bertentangan dengan prinsip dasar dalam pernikahan yang menghendaki adanya ijab kabul yang didasari kerelaan dan pilihan bebas dari kedua belah pihak. Dalam konteks hukum, pemaksaan semacam ini menghilangkan unsur esensial dari kesepakatan, yang pada gilirannya dapat menjadikan akad nikah tersebut cacat hukum dan berpotensi untuk dibatalkan melalui jalur pengadilan (Izzah et al., 2021).

Dalam praktik sosial, nikah ijbar sering kali tersamarkan dalam balutan tradisi perjodohan. Meskipun demikian, dalam praktik perjodohan yang berlandaskan hukum Islam, pemahaman kontekstual terhadap Hak Ijbar memegang peranan yang sangat fundamental.

Hal ini krusial karena berkaitan erat dengan bagaimana hak tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan secara proporsional dalam proses pengambilan keputusan pernikahan. Pemahaman yang proporsional berarti memastikan bahwa penggunaan Hak Ijbar oleh wali tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam mengenai kerelaan (ridha) calon mempelai. Penerapan Hak Ijbar yang tidak tepat dapat mengarah pada pemaksaan, yang berpotensi mencederai hak individu untuk memilih pasangan hidupnya, serta dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang mendalam mengenai batas-batas kewenangan wali dan perlindungan terhadap hak asasi individu untuk menyatakan persetujuan secara bebas, demi terciptanya pernikahan yang sah secara hukum dan syariat, serta harmonis secara social (Rahmawati & Adhim 2023).

Fenomena ini terefleksi dalam kasus permohonan pembatalan perkawinan yang disidangkan di Pengadilan Agama Kota Pasuruan. Pernikahan yang dibangun atas dasar pemaksaan oleh orang tua, tanpa mempertimbangkan aspirasi dan harapan pribadi kedua mempelai, secara inheren cenderung tidak mencapai keharmonisan. Ketidaksesuaian fundamental antara kehendak pribadi Pemohon dan Termohon inilah yang menjadi akar permasalahan dalam dinamika rumah tangga mereka. Kondisi ini kemudian mendorong peneliti untuk melakukan kajian mendalam mengenai implikasi perkawinan paksa terhadap pembatalan perkawinan, sebagaimana yang terjadi di yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan.

B. Metode

Penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan ini, secara konseptual, dapat dipahami sebagai suatu analisis doktrinal yuridis, kajian hukum positif, atau bahkan jurisprudensi murni. Esensi karakteristik dari metode ini terletak pada tidak diterapkannya inkuiri empiris atau riset lapangan. Ini berarti bahwa proses pengumpulan data tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian di lapangan, wawancara, atau observasi. Sebaliknya, fokus utama dari penelitian ini sepenuhnya berpusat pada bahan hukum (*legal materials*). Bahan hukum yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin-doktrin hukum, teori hukum, serta literatur-literatur hukum lainnya yang relevan. Dengan demikian, validitas temuan penelitian ini sangat bergantung pada interpretasi dan analisis yang cermat terhadap sumber-sumber hukum tertulis tersebut, bukan pada data yang dikumpulkan dari fenomena sosial atau perilaku di masyarakat (Yanova et al., 2023).

Penelitian ini secara spesifik mengaplikasikan pendekatan undang-undang (*legal approach*). Pendekatan ini merupakan suatu kerangka analisis yang secara fundamental memusatkan perhatian pada penelaahan mendalam terhadap norma-norma hukum positif yang relevan, serta bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam konteks faktual dari kasus-kasus yang menjadi objek penyelidikan. Ini melibatkan identifikasi, interpretasi, dan analisis pasal-pasal undang-undang, peraturan pemerintah, dan regulasi lain yang berkaitan. Sebagai ilustrasi konkret dari penerapan pendekatan ini, dapat dicermati Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut secara eksplisit dan tegas menetapkan suatu dasar hukum yang memungkinkan pembatalan perkawinan apabila ikatan tersebut dilangsungkan di bawah pengaruh tekanan atau ancaman yang secara yuridis tidak sah (Widianita, R., 2023).

Penelitian ini mengandalkan data primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019 dan Putusan Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas beserta dokumen perkaranya berupa gugatan, jawaban, bukti, saksi. Selain itu, digunakan pula data sekunder berupa Data ini terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait hukum perkawinan, seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Tidak hanya itu, berbagai literatur hukum turut menjadi sumber data sekunder, meliputi buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan teori dan prinsip pembatalan perkawinan serta isu perkawinan paksa (Putri, I., 2023).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk memastikan keabsahan studi dan dilakukan melalui dokumentasi serta studi kepustakaan (*Library Research*). Metode dokumentasi melibatkan pengkajian berbagai bentuk tulisan atau catatan yang relevan dengan topik (Tanjung et al., 2022). Sementara itu, studi kepustakaan berfokus pada analisis buku-buku yang membahas pembatalan perkawinan dan perkawinan paksa, kasus-kasus serupa, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan (Fadilla, R., & Wulandari, A., 2023). Serta dalam metode pengelolaan dan analisis data diterapkan setelah pengumpulan data untuk mentransformasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan mudah dipahami. Tujuan utamanya adalah menyajikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik data yang relevan dengan pembatalan perkawinan sesuai kerangka hukum. Ruang lingkup analisis ini secara spesifik merujuk pada konteks hukum yang dikaji, misalnya, dengan merujuk pada Undang-Undang yang mengatur pembatalan perkawinan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Prosedur Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Paksa Dalam Perkara Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas

Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan hukum deklaratif yang secara retroaktif menetapkan bahwa suatu ikatan pernikahan adalah tidak sah dan karenanya dianggap tidak pernah memiliki eksistensi hukum. Kondisi ini timbul manakala salah satu atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi persyaratan substantif yang telah digariskan oleh regulasi perundang-undangan. Secara lebih rinci, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mengatur mengenai landasan yuridis bagi pembatalan perkawinan.

Hal tersebut berlaku apabila syarat-syarat fundamental, seperti batas usia minimum, tidak adanya hubungan kekerabatan atau keluarga yang menghalangi, atau kondisi kesehatan mental salah satu pihak, tidak terpenuhi pada saat akad perkawinan dilangsungkan. Selain itu, perkawinan paksa juga dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. Aspek ini, yang terkait erat dengan ranah kekuasaan orang tua terhadap anak, secara historis telah pula diatur dalam Pasal 298 hingga 306 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Ketentuan-ketentuan tersebut secara implisit maupun eksplisit menegaskan prinsip bahwa suatu perkawinan harus dilandasi oleh kehendak bebas dan tanpa unsur paksaan (Zakiah, 2021).

Prosedur pembatalan perkawinan juga telah diatur secara komprehensif. Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara eksplisit menyatakan bahwa prosedur pengajuan permohonan pembatalan pernikahan mengikuti tata cara yang serupa dengan prosedur pengajuan gugatan cerai. Selanjutnya, ayat berikutnya dalam pasal yang sama menjelaskan bahwa seluruh rangkaian proses, mulai dari pemanggilan pihak-pihak yang terlibat, pemeriksaan perkara, hingga penetapan putusan pengadilan dalam kasus pembatalan perkawinan, harus mengikuti prosedur yang sama sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah tersebut. (Jasmine, 2020).

Menurut Dr. Rohmadi, (2023), Prosedur pembatalan perkawinan mencakup beberapa ketentuan penting yang harus dipenuhi. Pihak yang berkeinginan untuk membatalkan ikatan pernikahan diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Yurisdiksi ini ditentukan oleh tempat dilangsungkannya

pernikahan atau berdasarkan domisili sah dari salah satu pihak, baik suami maupun istri. Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan melaksanakan penelitian komprehensif terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk pemeriksaan detail atas dokumen-dokumen yang menguraikan alasan mendasar dari permohonan pembatalan tersebut.

Selanjutnya, pemanggilan pihak-pihak berperkara akan dilakukan secara langsung. Jika pihak yang bersangkutan tidak dapat ditemukan, surat pemanggilan dapat disampaikan melalui perangkat desa sebagai perpanjangan tangan resmi pengadilan. Hakim yang menangani perkara akan memulai pemeriksaan berkas dalam kurun waktu 30 hari terhitung sejak berkas permohonan diterima oleh pengadilan. Proses ini akan menelaah secara cermat seluruh aspek hukum dan fakta yang relevan. Pada akhirnya, putusan pengadilan akan menjadi keputusan final yang secara hukum menyatakan bahwa ikatan pernikahan tersebut tidak lagi sah.

Prosedur pembatalan perkawinan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perkawinan paksa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukanlah proses yang sewenang-wenang. Sebaliknya, pembatalan perkawinan di lingkungan peradilan agama harus melalui proses hukum yang terstruktur dan ketat, didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara yuridis. Hal ini berarti bahwa setiap permohonan pembatalan harus memenuhi kriteria hukum yang ditetapkan, dan keputusan tidak dapat diambil tanpa bukti dan pertimbangan yang cermat. Pengadilan Agama akan meninjau secara mendalam apakah benar ada unsur pemaksaan yang signifikan sehingga melanggar prinsip kerelaan dalam pernikahan. Proses ini mencakup pengajuan permohonan tertulis, penelitian bukti-bukti oleh hakim, pemanggilan pihak-pihak terkait, hingga akhirnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari prosedur yang ketat ini adalah untuk menjaga integritas lembaga perkawinan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak individu, terutama yang terkait dengan kebebasan berkehendak dalam memilih pasangan, tetap terlindungi.

Perkawinan paksa, sebagai bentuk pelanggaran fundamental terhadap hak asasi manusia, memiliki landasan hukum yang tegas di Indonesia. Praktik ini secara eksplisit melanggar Pasal 16 ayat (1) serta Pasal 17 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua pasal tersebut secara imperatif mensyaratkan bahwa persetujuan dalam ikatan perkawinan harus didasarkan pada kehendak bebas dari setiap calon mempelai, tanpa adanya

paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Selain itu, kerangka hukum positif Indonesia juga mengkategorikan perkawinan paksa sebagai bentuk kekerasan. Hal ini diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang secara eksplisit mengklasifikasikan berbagai manifestasi perkawinan paksa sebagai kekerasan seksual. Kategorisasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, perkawinan anak, perkawinan paksa yang dilakukan atas nama adat, serta perkawinan yang melibatkan korban pemerkosaan dengan pelakunya. Dengan demikian, perkawinan paksa tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma etika atau ajaran agama, tetapi juga sebagai tindak pidana serius yang implikasinya membawa konsekuensi hukum substantif. (Leonardo et al., 2023).

Proses pembatalan perkawinan dilakukan melalui pengajuan gugatan Pengadilan Agama Pasuruan, (2024) oleh pihak yang merasa dirugikan atau oleh individu yang memiliki kepentingan hukum tertentu, dalam perkara nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas perkara ini diajukan oleh Pemohon yang bernama Muhammad Nur Kholis bin Masruhan melawan Termohon yang bernama Saidatul Makhbubah binti Munir. Pengajuan perkara ini disertai dengan dalil yang sah dan dibuktikan dengan bukti atau keterangan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada tahap proses pengajuan perkara terkait pembatalan perawinan akibat perkawinan paksa, perkara yang diterima selanjutnya memasuki tahap persidangan, yang secara normatif menjadi forum untuk menguji kebenaran materiil dari dalil-dalil yang diajukan para pihak. Dalam proses ini, baik pemohon maupun termohon diberi kesempatan untuk mengemukakan argumentasi hukum serta menyampaikan alat-alat bukti yang relevan.

Suwardi, (2021) menjelaskan bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan yuridis esensial bagi proses pembatalan suatu perkawinan. Ketentuan ini mengizinkan pembatalan manakala pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan tidak memenuhi persyaratan sahnya akad nikah sebagaimana ditetapkan oleh regulasi perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini secara kategoris menegaskan bahwa prosedur pembatalan perkawinan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa pembatalan bukanlah suatu tindakan unilateral, melainkan harus melalui mekanisme yudisial yang sah dan terverifikasi. Lebih jauh, permohonan pembatalan ini dibatasi pada pihak-pihak yang memiliki

legitimasi hukum, yakni entitas yang secara langsung mengalami kerugian akibat keberlanjutan ikatan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Adanya legitimasi ini menjamin bahwa hanya pihak yang berkepentingan dan terdampak secara hukum yang berhak mengajukan permohonan pembatalan.

Prosedur pembatalan perkawinan menunjukkan karakteristik khusus dalam penanganannya, yaitu tidak termasuk dalam kategori perkara yang mewajibkan mediasi. Pembatalan perkawinan diklasifikasikan sebagai salah satu jenis perkara sengketa perkawinan, sebagaimana ditetapkan secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Pandangan hukum ini merefleksikan bahwa sengketa dalam kategori pembatalan perkawinan bersifat prinsipil, karena menyangkut keabsahan fundamental dari suatu ikatan perkawinan itu sendiri. Oleh karena sifatnya yang prinsipil, penyelesaian sengketa semacam ini tidak dapat dicapai melalui kompromi atau negosiasi informal sebagaimana lazimnya dalam proses mediasi. Sebaliknya, penentuan keabsahan atau pembatalan perkawinan harus diputuskan secara langsung melalui proses litigasi oleh pengadilan. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa penetapan status hukum perkawinan didasarkan pada penegakan hukum yang rigid dan tidak dapat dinegosiasikan (Nugraheni, 2020).

Perkara Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas mengenai pembatalan perkawinan akibat paksaan telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Proses di Pengadilan Agama Pasuruan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan peraturan terkait. Ini meliputi pengajuan gugatan yang sah, pemeriksaan oleh pengadilan yang berwenang, serta pertimbangan hakim yang didasari bukti kuat mengenai adanya paksaan dalam pernikahan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Paksa Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas

Dalam mengadili perkara pembatalan perkawinan, hakim memiliki tanggung jawab krusial untuk membuat keputusan yang adil dan berlandaskan hukum. Keputusan tersebut tidak diambil secara sembarangan, melainkan didasarkan pada tiga elemen utama yang menjadi fondasi pertimbangan yudisial yang komprehensif. Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk kerangka analisis bagi hakim dalam menentukan keabsahan suatu permohonan pembatalan perkawinan. Elemen pertama adalah argumentasi hukum yang dikemukakan oleh para pihak. Baik pihak Pemohon maupun Termohon

memiliki kesempatan untuk menyampaikan dalil-dalil hukum yang mendukung posisi mereka. Pemohon, sebagai pihak yang mengajukan pembatalan, harus menguraikan secara jelas dan sistematis alasan-alasan hukum mengapa perkawinan tersebut seharusnya dibatalkan. Argumentasi ini harus merujuk pada ketentuan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur syarat sahnya perkawinan atau alasan pembatalan.

Elemen kedua yang menjadi pertimbangan hakim adalah kelengkapan serta kekuatan alat bukti yang diajukan. Dalam sistem peradilan, "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan." Oleh karena itu, Pemohon harus mengajukan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung argumentasi hukumnya. Alat bukti ini dapat berupa bukti tertulis seperti akta nikah, surat-surat perjanjian, dokumen medis jika terkait kesehatan mental atau usia, atau dokumen lain yang relevan. Selain itu, bukti lisan seperti keterangan saksi juga sangat penting. Hakim akan menilai tidak hanya kelengkapan bukti-bukti tersebut, tetapi juga kekuatan atau bobot pembuktiannya. Sebuah bukti harus relevan dengan pokok perkara, sah menurut hukum, dan memiliki daya kekuatan pembuktian yang cukup untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil yang diajukan. Misalnya, dalam kasus perkawinan paksa, bukti dapat berupa rekaman komunikasi, kesaksian pihak ketiga yang melihat adanya tekanan, atau laporan psikologis yang menunjukkan dampak pemaksaan. Jika bukti yang diajukan lemah atau tidak relevan, meskipun argumentasi hukumnya kuat, permohonan pembatalan dapat ditolak.

Elemen ketiga adalah validitas keterangan saksi yang dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti penting dalam persidangan. Hakim akan menilai kredibilitas saksi, objektivitas kesaksiannya, dan apakah keterangan tersebut konsisten dengan bukti-bukti lain yang ada. Saksi haruslah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi fakta hukum. Hakim akan melakukan uji silang (*cross-examination*) terhadap saksi untuk menguji kebenaran dan konsistensi keterangan mereka. Aspek penting lainnya adalah apakah keterangan saksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang berarti saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan menyadari konsekuensi hukum apabila memberikan keterangan palsu.

Setiap putusan hakim wajib memiliki argumen rasional (ratio decidendi) yang eksplisit dan terperinci. Prinsip fundamental ini secara tegas diatur dalam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa legitimasi dan akuntabilitas suatu putusan peradilan sangat bergantung pada kapabilitas hakim untuk memaparkan secara transparan pertimbangan hukum dan fakta yang menjadi basis putusan tersebut. Pertimbangan ini, yang merupakan justifikasi hukum putusan, harus cukup dan jelas. Putusan yang tidak memenuhi syarat ini disebut onvoldoende gemotiveerd, sebagaimana ditegaskan Pasal 50 UU tersebut (Sulistyawan, 2021). Yasa & Iriyanto, (2023) secara imperatif menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus mengintegrasikan tiga prinsip filosofis hukum yang fundamental yaitu: keadilan (gerechtigheit), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).

Sudirman, (2021) dalam bukunya menerangkan terkait konteks yudisial, tahap inisiasi pertimbangan hakim secara formal diawali dengan penetapan majelis hakim, puncak dari proses ini adalah penetapan resmi Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan. Dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkara pembatalan perkawinan, hakim memiliki kewajiban fundamental untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan objektif terhadap keseluruhan fakta hukum yang relevan. Tujuan utama dari pemeriksaan yang komprehensif ini adalah untuk secara meyakinkan membuktikan keberadaan cacat hukum yang melekat pada ikatan perkawinan yang menjadi objek permohonan pembatalan. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk hanya bergantung pada klaim sepihak, melainkan harus secara proaktif mengidentifikasi dan menganalisis setiap elemen yang berpotensi memengaruhi keabsahan perkawinan sejak awal dilangsungkannya akad.

Proses pemeriksaan ini mencakup evaluasi mendalam terhadap persyaratan sah perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang, meliputi aspek usia, ketiadaan halangan perkawinan, serta ada atau tidaknya unsur paksaan atau penipuan. Dengan demikian, putusan pembatalan perkawinan tidak semata-mata didasarkan pada asumsi, melainkan pada penemuan fakta hukum yang solid dan terbukti secara objektif di hadapan persidangan (Ani, 2022). Fakta hukum tersebut termasuk didalamnya adalah dalil-dalil yang telah diajukan oleh pemohon serta bukti-bukti dan saksi.

Dalam dalil perkaranya pemohon menyampaikan bahwa, pernikahan yang dilangsungkan adalah atas dasar paksaan orang tua, Bukti yang diajukan dalam proses peradilan merupakan unsur fundamental dalam menilai validitas dan kekuatan dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh para pihak. Dalam

perkara Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas disebutkan bahwa, pada tanggal 09 Mei 2024, telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon yang tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor: 3514231052024014 yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2024.

Bukti lain yang diajukan pemohon adalah keterangan saksi, keterangan saksi menjadi alat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan suatu perkara. Pemohon mendatangkan 2 saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya kepada majelis hakim antara lain, Masruhan bin Kasnawi sebagai orangtua pemohon dan Miftachul Amin bin Abd. Rahman sebagai kakak ipar pemohon. Dalam keterangannya kedua saksi sama-sama meneyebutkan bahwa antara pemohon dan termohon belum melakukan hubungan suami-istri (qoblah dukhul).

Pertimbangan hakim selanjutnya disebutkan dalam perkara Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas adalah sebagai berikut:

a) Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan dapat dilanjutkan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur pemanggilan pihak secara elektronik dan surat tercatat, memastikan prosedur panggilan sah.
b) Pengadilan Agama Pasuruan juga memiliki kompetensi relatif dan absolut untuk mengadili perkara ini, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, KHI, serta UU No. 3 Tahun 2006.
c) Permohonan Pemohon dinilai tidak melampaui batas waktu, sehingga diterima untuk dipertimbangkan. Meskipun Termohon tidak hadir dan secara hukum dianggap mengakui dalil Pemohon,
d) Majelis Hakim tetap melaksanakan tahap pembuktian demi kehati-hatian. Terakhir, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai UU Peradilan Agama.

Dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara ini telah melalui pertimbangan yang matang dan berlandaskan kebenaran hukum. Hal ini tercermin jelas dalam pertimbangan hukum putusan, yang secara komprehensif menguraikan proses kualifikasi yang cermat terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Hakim tidak hanya sekadar menerima klaim, melainkan menganalisis secara mendalam relevansi dan legalitas setiap argumen yang disampaikan.

Lebih lanjut, pertimbangan putusan juga memperlihatkan penilaian komprehensif terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Setiap alat bukti, baik tertulis maupun lisan, telah dievaluasi kekuatan dan keabsahannya, memastikan bahwa dasar putusan didukung oleh fakta-fakta yang teruji. Penting pula dicatat bahwa Hakim telah mempertimbangkan setiap aspek perkara secara kronologis dan rinci dalam isi putusan. Pendekatan ini memastikan bahwa alur peristiwa hukum dipahami dengan baik, dan setiap detail yang relevan telah dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan merupakan cerminan dari proses yudisial yang teliti, objektif, dan akuntabel, menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

D. Simpulan

Hasil penelitian ini, yang mengkaji pembatalan perkawinan akibat paksaan melalui Studi Kasus Perkara Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas, menyimpulkan bahwa prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pasuruan telah dilaksanakan selaras dengan kaidah hukum yang berlaku. Implementasi prosedur ini secara ketat merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rangkaian prosedur tersebut dimulai dengan pengajuan permohonan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan, diikuti oleh pemeriksaan berkas secara komprehensif. Tahap selanjutnya adalah persidangan, di mana peran hakim menjadi krusial dalam melakukan peninjauan cermat terhadap seluruh alat bukti yang diajukan. Peninjauan ini secara spesifik berfokus pada verifikasi unsur perkawinan paksa, sebuah elemen esensial yang menjadi landasan bagi pembatalan perkawinan. Keseluruhan rangkaian proses ini ditujukan untuk menjamin legitimasi dan keabsahan putusan hukum yang dikeluarkan, sehingga penetapan pembatalan perkawinan didasarkan pada fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas secara lebih lanjut mengungkapkan bahwa majelis hakim melakukan analisis komprehensif terhadap dalil permohonan Pemohon dengan mengaitkannya pada alat bukti yang tersedia. Dalam proses tersebut, hakim secara spesifik berhasil mengidentifikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua pasal tersebut merupakan landasan normatif yang mengatur keabsahan suatu perkawinan, dengan penekanan imperatif pada persetujuan bebas dari kedua belah pihak dan ketiadaan unsur paksaan. Temuan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan fundamental ini menjadi inti pertimbangan yudisial

dalam membatalkan ikatan perkawinan tersebut. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan formalitas prosedural, melainkan representasi dari implementasi aktif prinsip keadilan substantif, yang berupaya menegakkan esensi keadilan di luar aspek formalistik hukum, serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terdampak. Hal ini secara definitif menunjukkan bahwa lembaga peradilan berfungsi untuk melindungi hak asasi individu dalam menentukan kehendak bebasnya dalam konteks perkawinan. Dengan demikian, putusan hakim ini menegaskan komitmen pengadilan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum perkawinan, terutama dalam konteks kehendak bebas dan otonomi pribadi dalam membentuk ikatan suci pernikahan.

Daftar Rujukan

Ani, Y. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Jurnal Repertorium*. http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/3318

Azhari, M. B., & Priandini, L. (2022). Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms). *Palar | Pakuan Law Review*, *8*(1), 212–227. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4777

Dr. Rohmadi, M. A. (2023). *Prosedur dan akibat hukum pembatalan perkawinan menurut ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1947 dan hukum islam* (M. E. S. Edi Mulyono (ed.)). Muslim, Yayasan Pendidikan Cendekia.

Ismi Putri. (2023). Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa menurut kompilasi hukum islam. *Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, *13*(1), 104–116.

Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269

Izzah, H., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *2*(1), 59–78. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174

Jasmine, K. (2020). *Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan*. *9*.

Leonardo, J., Mongkaren, F., Belakang, A. L., Antow, D. T., Mamengko, R. S., Republik, U. D., & Tahun, I. (2023). Tindakan Pidana Pemaksaan Perkawinan. *Lex Crimen*, *12*(3).

Neneng Resa Rosdiana, & Titin Suprihatin. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, *16*, 21–25. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714

Nugraheni, D. B. (2020). Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *14*(2), 251–266. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.4177

Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, *2*(2), 86–98. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894

Pengadilan Agama Pasuruan, S. (2024). *Putusan Nomor Perkara 1414/Pdt.G/2024/PA.Pas*.

Rika Widianita, D. (2023). Pembatalan Perkawinan karena kawin paksa menurut kompilasi hukum islam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *VIII*(I), 1–19.

Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap PengumpulanData. *Mitita Jurnal Penelitian*, *1*(No 3), 34–46.

Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*.

Sulistyawan, A. Y. (2021). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Ius Constituendum, Volume 6*, *18*(2), 41. https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920

Suwardi. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama. *Ensiklopediaku*, *3*(1), 6.

Tanjung, R., Supriani, Y., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, *6*(1), 29. https://doi.org/10.32529/glasser.v6i1.1481

Yanova, M. hendri, Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, *8*(2), 394–408.

Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. *Jurnal Rechtens*, *12*(1), 33–48. https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957

Zakiah, N. (2021). Kekuasaan orang tua menurut kuhp dan undang- undang perkawinan. *Ash-Shalabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *7*(1), 25–30.